

# Literature review: Urgensi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Daerah

**Nandita Maharani**

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
email: 200502110029@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

akuntabilitas kinerja; ketepatan anggaran; sistem pelaporan; ketaatan pada peraturan perundang-undangan; pengendalian internal

## Keywords:

performance accountability; budget accuracy; reporting system; compliance with laws and regulations; internal control

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji urgensi akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah. Seperti yang kita ketahui, pemerintah daerah sebagai pelaksana pelayanan publik memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Sehingga, akuntabilitas kinerja menjadi sangat penting. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode literature review dengan mengkaji penelitian yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah urgensi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tercermin dalam aspek-aspek seperti ketepatan anggaran, sistem pelaporan, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan pengendalian internal yang baik.

## ABSTRACT

This research was conducted with the aim of examining the urgency of performance accountability in local government. As we know, local government as executor of public services has an important role in implementing the public interest. Thus, performance accountability becomes very important. This research was conducted using the literature review method by reviewing relevant research. The results of this study are the urgency of local government performance accountability reflected in aspects such as budget accuracy, reporting systems, compliance with laws and regulations, and good internal control.

## Pendahuluan

Pemerintah daerah sebagai unit pelaksana pelayanan publik memegang peran penting dalam memenuhi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat. Mereka bertanggungjawab atas penyelenggaraan layanan masyarakat, penggunaan dana publik, serta implementasi kebijakan yang akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah harus dilaksanakan secara tepat dan efisien. “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan baik berhasil ataupun gagal dalam proses mencapai misi sebuah organisasi, adapun beberapa komponen yang dijadikan acuan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja” (Rahayu et al., 2021). Pemerintah diharuskan memberitahu masyarakat terkait penggunaan dan tata kelola sumber daya publik



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sehingga akuntabilitas sangat diperlukan (Brusca & Montesinos, 2016). Dapat disimpulkan, bahwa pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dananya secara administratif. Hal ini sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang harus diterapkan.

Transparansi adalah salah satu aspek yang mendasar untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perwujudan tata pemerintah yang baik mensyaratkan terdapatnya keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan akses untuk warga terhadap proses penyelenggaraan pemerintah (Sabarno, 2007:38). Dengan adanya transparansi masyarakat dapat mengetahui terkait informasi, komunikasi, maupun budgeting terkait dana daerah. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan kinerja aksi seseorang kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana maka akan menghindari adanya potensi penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah.

Adanya fenomena yang sering terjadi seperti kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana untuk tujuan pribadi memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan. Kepentingan dari akuntabilitas kinerja dalam lingkup pemerintah daerah dapat dilihat dari peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pertumbuhan ini tidak hanya dievaluasi dari predikat dan penilaian, melainkan juga melalui perkembangan upaya serta pencapaian yang dihasilkannya. Namun, pentingnya akuntabilitas kinerja dalam organisasi pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada penilaian SAKIP. Ini berkaitan erat dengan upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih kapabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni & Triatmanto, 2020) yang berjudul *the effect of the organizational change on company performance mediated by changes in management accounting practices* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam praktik akuntansi memiliki efek positif terhadap kinerja perusahaan. Dalam konteks urgensi akuntabilitas kinerja, dapat diartikan bahwa praktik akuntansi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan mengadaptasi praktik akuntansi yang baik, pemerintah daerah dapat menghadapi tantangan dan peluang yang ada dengan lebih baik, dengan tetap mempertahankan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apa saja urgensi yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah, yang diharapkan dapat membantu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada.

### **Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori agensi, yaitu teori yang mengemukakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu harus dipertanggungjawabkan. Menurut Bonner & Sprinkle (2002) "Teori keagenan berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan berusaha untuk memanfaatkan utilitasnya". Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang maka akan semakin besar kemungkinan ia memanfaatkan kekuasaannya yang akan berdampak

pada akuntabilitas kinerjanya.

### **Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban bagi suatu instansi untuk menyampaikan tujuan yang telah dicapai dan hasil kinerja yang telah dilakukan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja harus memiliki indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu juga harus transparan sehingga para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat mengetahui dan mengakses hasil kinerjanya dengan mudah. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban agen dalam memberikan, menyajikan, dan mengungkapkan pertanggung jawaban dari segala tindakannya yang telah menjadi tanggung jawabnya kepada principal. Dalam instansi pemerintah, akuntabilitas kinerja berperan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaporkan kinerja yang telah dilakukan kepada pihak eksternal seperti masyarakat dan pemerintah. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah, maka instansi pemerintah harus menyusun rencana yang paling strategis dalam bentuk indikator yang relevan dan terukur untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah melaksanakan kinerjanya instansi pemerintah harus membuat laporan yang berisi tentang kinerja yang telah dilakukan, apa rencana yang tidak dapat dijalankan dan bagaimana solusi dari permasalahan yang ada.

### **Metode Penelitian**

Untuk memahami urgensi akuntabilitas kinerja pada organisasi pemerintah daerah, studi literatur dilakukan dalam penelitian ini. Studi literatur adalah metode yang dilakukan melalui identifikasi beberapa literatur yang relevan yang diklasifikasikan berdasarkan beberapa relevansi dan kualitas dari literatur yang ditemukan (Stewart et al., 2010). Dengan literatur yang relevan, akan dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana akuntabilitas kinerja menjadi pondasi bagi peningkatan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Dalam konteks ini, studi literatur akan menguraikan dan mengeksplorasi urgensi akuntabilitas kinerja dalam organisasi pemerintah daerah.

## **Pembahasan**

### **Pentingnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melibatkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dan dana publik yang dikelola. Akuntabilitas kinerja yang baik akan memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, juga dapat mencerminkan bahwa dana publik yang diperoleh digunakan sesuai prioritas pembangunan, tidak terjadi pemborosan atau penyelewengan dana. Akuntabilitas kinerja juga membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan melacak dan melaporkan progres terhadap indikator-indikator pembangunan, pemerintah daerah dapat

memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berdampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Diikuti dengan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kinerja dapat menambah saran dan umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program dan layanan publik. Pemerintah daerah harus secara kritis mengevaluasi hasil kinerja dan belajar dari pengalaman. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi apa yang telah berhasil dan mengapa, serta mengidentifikasi masalah atau kelemahan yang mungkin muncul.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah**

Faktor yang pertama adalah ketepatan anggaran. Dalam acara SAKIP RB Award 2020 yang dilaksanakan di Jakarta Pak Boedi Utomo selaku Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Malang mengungkapkan “Untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas pemerintahan, Pemkot Malang telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang tentu menjadikan inefisiensi anggaran.”. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan anggaran menjadi faktor penting untuk mengukur apakah kinerja pemerintah telah tercapai (Afdhal & Rahayu, 2022). “Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab” (Zakiyudin & Susanto, 2015). Ketika ketepatan anggaran tinggi maka anggota organisasi dapat mengetahui dengan jelas apa yang harus mereka kerjakan, sehingga pelaksanaan kinerja tidak terhambat dan akan membuat akuntabilitas kinerja menjadi tinggi. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian di beberapa organisasi pemerintah daerah yang berbeda, dan diperoleh hasil bahwa pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran dengan melakukan pemangkasan program yang dirasa tidak tepat sasaran dan tidak mendukung kinerja instansi. Ajibolade & Oboh (2017) menyatakan bahwa pengelolaan yang berakuntabilitas oleh pemerintah tidak akan lepas dari anggaran, anggaran memiliki pengaruh yang signifikan dalam administrasi dan keberlangsungan suatu negara. Ketepatan anggaran ini dapat dilihat dari sasaran prioritas, kinerja, jangka waktu, standar, dan koordinasi.

Faktor yang kedua adalah sistem pelaporan. Instansi pemerintah harus selalu diawasi dan dikendalikan kinerjanya guna mengimplementasikan anggaran yang telah diproyeksikan agar dapat dibuat sistem pelaporan yang baik (Budiani & Asyik, 2021). Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000) mengatakan bahwa “Laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, obyektif, dan transparan”. Sebagai organisasi publik, pemerintah harus menyediakan informasi keuangan berupa laporan dengan akurat, relevan, dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan baik dalam hal politik, ekonomi, maupun sosial oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan kinerja manajerial dalam realisasi anggaran. Sistem pelaporan yang baik dapat dinilai dari ketepatan waktu dan kekonsistenan dalam pelaporan, keakuratan informasi dalam laporan, analisis terhadap penyimpangan, dan laporan prestasi kerja.

Faktor yang ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketaatan pada peraturan perundangan merupakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aparatur pemerintahan secara konsisten agar

terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik (Wahid, 2016). Kepatuhan pada peraturan perundangan mendorong pemerintah daerah untuk beroperasi dengan integritas dan etika yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan kejujuran, menghindari konflik kepentingan, dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. Selain itu, peraturan perundangan sering kali mengandung ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan mematuhi peraturan ini, pemerintah daerah dapat meminimalkan risiko terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik, sehingga akan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini dapat dinilai dari pelaksanaan akuntabilitasnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum, apakah ada sanksi yang diberikan jika melanggar peraturan, dan apakah pelaporannya telah dibuat sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Faktor yang keempat adalah pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula (Fitrawati et al., 2017). Dengan adanya pengendalian internal yang baik akan mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan, sehingga akan tercipta proses kegiatan yang baik dan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan. Menurut PP RI Nomor 60 Tahun 2008 ada beberapa unsur dalam pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan pengendalian intern. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Ini membantu dalam mencegah penyelewengan, kesalahan, dan tindakan yang tidak etis.

Ketepatan anggaran, sistem pelaporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian internal merupakan faktor-faktor penting yang berkontribusi pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Ketepatan anggaran memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana publik, sementara sistem pelaporan yang baik mendukung transparansi dan pengawasan kinerja. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mencerminkan integritas dan etika, serta mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pengendalian internal yang kuat menjaga integritas dan mencegah penyimpangan. Keseluruhan faktor-faktor ini bersama-sama mengarah pada pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan akan menciptakan tata kelola yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun berdasarkan hasil penelitian ini beberapa urgensi yang dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja suatu organisasi pemerintah daerah yaitu ketepatan anggaran,

sistem pelaporan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian internal. Akuntabilitas kinerja mendorong pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola anggaran secara cermat agar dana publik digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan memiliki sistem pelaporan yang transparan dan terukur, masyarakat dapat memantau pencapaian tujuan pemerintah dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Akuntabilitas kinerja juga melibatkan pemastian bahwa semua tindakan dan keputusan pemerintah sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Pengendalian internal yang baik perlu dilakukan untuk membantu melindungi aset pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Secara keseluruhan, keempat faktor ini saling terkait dan saling memperkuat urgensi akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah. Dengan mengoptimalkan ketepatan anggaran, sistem pelaporan yang transparan, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan pengendalian internal yang baik, pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan efisien dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat yang dilayani. Akuntabilitas kinerja bukan hanya tentang pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, tetapi lebih penting lagi kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang berkualitas dan pemerintahan yang terpercaya.

### **Saran**

Meskipun memiliki beberapa manfaat, kajian ini memiliki banyak keterbatasan, hal ini dikarenakan penelitian hanya dilakukan berdasarkan narasi kajian literatur yang tidak sistematis. Maka pembaca harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan dari hasil kajian ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lapangan secara menyeluruh agar mendapatkan gambaran dan hasil yang dapat diandalkan.

### **Daftar Pustaka**

- Afdhal, A. M. N., & Rahayu, A. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 5(2), 57–65.
- Budiani, L. V., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., Lestari, T. D., (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3).
- Kharisma, I., Rahayu, S., & Yudi. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Jambi (Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(2), 126–135.

- Pratiwi, E. P. & Amanah. L. (2019). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, kualitas SDM, dan Pengendalian Manajerial terhadap Akuntabilitas Kinerja. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(3).
- Oktaviani, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan pada Peraturan Perundangan, dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. JUHANPERAK, 1 (2).
- Rininda, B. P., & Sudaryati, E. (2020). Pengaruh Ketepatan Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. E-Jurnal Akuntansi, 30(5)
- Safitri, A. S. I. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah). Bongaya Journal for Research in Accounting, 2(2), 1–13.
- Sella, E. S. A., Maslichah., & Sudaryanti, D. (2020). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan pada Peraturan Perundangan, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan). E-JRA, 9(10)
- Wahyuni, N. & Triatmanto, B. (2020). The Effect of the Organizational Change on Company Performance Mediated by Changes in Management Accounting Practices. GrowingScience, Accounting 6